

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan dapat dikatakan sebagai golongan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, kualitas hidup yang kurang dan minimnya kesehatan. Kemiskinan juga bisa diartikan sebagai ketidak mampuan seseorang dalam perekonomian, adanya ketidakmampuan menandakan bahwa minimnya pendapatan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal tersebut dipengaruhi karena rendahnya pendidikan seseorang dan kurangnya pengalaman atau wawasan yang dimiliki.

Penuntasan kemiskinan adalah prioritas utama bagi pembangunan daerah. Pemerintah sendiri selalu mengadakan penanganan untuk mengatasi kemiskinan yang ada dan kemudian mensejahterakan masyarakat di setiap daerahnya. Masyarakat bisa dikatakan miskin untuk golongan masyarakat yang memiliki tempat tinggal di daerah pedesaan dan juga berdominan pada kegiatan di bidang pertanian (Todaro,1996:102). Selaras dengan penelitian yang dilaksanakan di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, yang mana masyarakatnya rata-rata berprofesi sebagai petani maupun sebagai buruh tani. Selain itu masyarakat juga ada yang berkerja sebagai serabutan yang dikarenakan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam permasalahan tersebut pemerintah banyak memberikan program untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau sering dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 silam. Program tersebut adalah upaya dari pemerintah untuk dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial utamanya pada penduduk miskin serta upaya untuk mengurangi rantai kemiskinan pada masyarakat. Maksud dari PKH itu sendiri ialah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Miskin (KM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program Keluarga Harapan diberikan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahapan yaitu pada Januari, April, Juli, dan Oktober di setiap tahunnya melalui bank anggota HIMBARA. Bantuan tersebut dalam satu bulannya berjumlah Rp. 250.000 yang diberikan pada keluarga penerima manfaat, kemudian pada anak usia 0-6 tahun menerima bantuan sebesar Rp. 250.000 per bulannya, anak SD mendapatkan bantuan Rp. 75.000 perbulannya, anak SMP mendapatkan bantuan sebesar Rp. 125.000, di jenjang SMA mendapatkan Rp. 160.000 dan khusus anak disabilitas mendapatkan bantuan sebesar Rp.200.000 setiap bulannya (laman kementerian sosial). HIMBARA itu sendiri ialah sebutan untuk empat bank dari BUMN, antara lain Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, serta Bank BTN. Himbara itu sendiri mayoritas sahamnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia dan mulai dipopulerkan sejak era Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno. Dalam penerima program PKH ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yang pertama, kesehatan dengan kriteria ibu hamil dan anak usia 0 (nol) – 6 (enam) tahun. Kedua, yaitu pendidikan dengan kriteria anak yang masih sekolah SD (Sekolah Dasar) sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Keatas). Ketiga, yaitu kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia 60 tahun keatas atau penyandang disabilitas (Kementerian sosial Kabupaten Nganjuk). Adapun hal yang harus diperhatikan oleh peserta PKH yang harus dilaksanakan oleh masyarakat penerima manfaat antara lain:

1. Anggota keluarga memeriksa kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Mengikuti kegiatan belajar paling sedikit 85% dari hari belajar efektif dan bagi anak sekolah wajib belajar 12 tahun.
3. Mengikuti belajar di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi usia 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.

4. KPM harus mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulanya.

Program Keluarga Harapan (PKH) diadakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dalam segi keterampilan, pendidikan dan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri No 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang sudah terdaftar dalam data terpadu melalui program penanganan fakir dan miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Tidak hanya dari segi ekonominya saja Program Keluarga Harapan juga memperhatikan dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dari keluarga yang menerima manfaat PKH khususnya keluarga buruh tani dari penerima manfaat. Buruh tani itu sendiri adalah seseorang yang bekerja pada pemilik modal untuk mendapatkan upah dari pemilik modal/lahan. Pekerjaan tersebut seperti mengelola, membersihkan, bercocok tanam di lahan yang sudah disewa. Menurut Witrianto (2011), buruh tani adalah seseorang yang menggantungkan hidupnya pada lahan yang disewa atau lahan pertanian untuk mata pencaharian utamanya. Sasaran dari bantuan PKH itu sendiri ialah keluarga miskin yaitu orang tua ayah, ibu dan anak, sedangkan satu orang tua memiliki tanggung jawab dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak kemudian bantuan dana tunai dari PKH ini diberikan kepada ibu dan selanjutnya disebut sebagai pengurus keluarga (Pedoman, PKH 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diadakan pemerintah ini sudah disalurkan hampir di semua Kabupaten yang terdapat di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2021, di Kabupaten Nganjuk sendiri penerima bantuan sosial PKH mencapai sekitar 60 ribu jiwa (Surabaya.tribunnews.com). Salah satu desa yang menerima bantuan dari program tersebut adalah Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. Desa Ngudikan sendiri memiliki penduduk yang berjumlah 5.894 jiwa, yang masing-masing terdiri dari 2.987 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.907 jiwa berjenis kelamin perempuan (BPS Nganjuk 2021). Dalam

Kecamatan Wilangan mencakup beberapa desa salah satunya desa yang dipilih oleh peneliti yaitu Desa Ngudikan. Desa Ngudikan sendiri tergolong sebagai desa agraris yang mana mata pencaharian utamanya adalah petani maupun buruh tani tetapi ada juga sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai tukang, pemulung, pedagang, jasa dan lain-lain. Dari Kordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk tahun 2021, Desa Ngudikan sudah menerima bantuan sejak tahun 2013 hingga sekarang, sedangkan pada tahun 2021 ini penerima bantuan PKH di Desa Ngudikan mencapai 198 keluarga miskin. Banyaknya penerima manfaat dari program PKH yang ada di Desa Ngudikan ini masih banyak masyarakat yang tidak bisa mandiri dari segi ekonominya dan ada pula masyarakat yang masih tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Program Keluarga Harapan sangat membantu untuk dapat membantu lebih mensejahterakan masyarakat, meskipun masih banyak masyarakat yang melenceng dari program sehingga bantuan yang diberikan melalui program tersebut tidak dapat tersalur dengan baik. Maka dari itu sangat dibutuhkan pendamping untuk mengarahkan agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima bantuan PKH dan bisa lebih mandiri kedepannya. Dengan ini pemerintah memberikan fasilitator yaitu pendamping yang akan memberikan pendampingan atau pengarahan kepada masyarakat penerima manfaat PKH. Dengan adanya kerjasama dari pendamping PKH diharapkan masyarakat meningkatkan usaha agar lebih mandiri kedepannya. Dalam program tersebut setiap wilayah atau kecamatan memiliki pendamping PKH masing-masing yang ditugaskan untuk mendampingi para masyarakat yang menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH). Dalam pendampingan masyarakat harus mengikuti program-program yang ada kemudian pendamping akan mengarahkan dan memberikan solusi atas permasalahan dari anggotanya.

Pendamping PKH merupakan pendamping yang berkedudukan sebagai mitra pemerintah maupun masyarakat yang dituntut untuk dapat membantu beberapa kepentingan pemerintah kepada masyarakat (Habibullah, 2011). Bisa juga diartikan sebagai sumber daya masyarakat yang ditugaskan

sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Direktorat Jamsos, 2016:16). Peran ini berkaitan dengan memotivasi dan dorongan yang positif bagi masyarakat. Adapun pekerjaan yang memang berkaitan dengan peran pendamping PKH ialah melakukan negosiasi dan mediasi, memberikan dukungan, membangun konsensus bersama serta melakukan pengorganisasian dengan pemanfaatan sumber. Dengan demikian, peran pendamping dalam PKH ialah untuk mengusahakan supaya masyarakat bisa mengembangkan, memiliki keberdayaan diri dan rasa tanggung jawab terhadap kehidupannya. Dengan hal tersebut pendamping PKH memiliki peran yang sangat penting bagi penerima manfaat, karena dalam pengentasan kemiskinan tersebut bergantung pada peran dan fungsi pendampingnya.

Penelitian mengenai program PKH dalam membantu kesejahteraan masyarakat yang juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu, pertama, peran pendampingan dalam program pemberdayaan masyarakat pada keluarga balita gizi buruk di Surabaya, penelitian ini membahas mengenai program pemberdayaan melalui pendampingan kepada keluarga balita gizi buruk agar angka gizi buruk di Surabaya menurun dan merubah pola asuh ibu balita menjadi lebih baik, praktik sosial yang dilakukan oleh pendamping ini bagian dari struktur yang dimiliki oleh Athony Giddens yang mana struktur sudah merubah pola asuh yang diberikan ibu pada balitanya, selain itu penelitian ini juga membahas dualitas mengenai struktur dan agensi dalam pendampingan hal ini agar pemberdayaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan maka agen (ibu balita) memiliki peranan penting untuk meningkatkan stimulasi psikososial anak, dalam hal ini peran pendamping untuk memperdayakan masyarakat ini dapat dirasakan dengan baik manfaatnya oleh keluarga dampingan adalah fungsi penguatannya (Anif, 2016).

Kedua, program *urban farming* sebagai model penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan, penelitian ini membahas mengenai suatu program dari Dinas Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan yang ada,

untuk menanggulangi hal tersebut Dinas Pertanian menyediakan pendampingan dari PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang akan membimbing secara teknis dan memberikan motivasi kepada masyarakat, dengan adanya program *urban farming* otomatis menghasilkan sebuah aturan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program hal tersebut adalah wujud dari strukturasi yang dicetuskan oleh Giddens, selain itu dalam program *urban farming* menyediakan beberapa kegiatan seperti kegiatan budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi penanaman, perawatan, pemanenan di lahan komunal, kegiatan pertemuan rutin, dan pelatihan maupun sosialisasi (Soenyono, 2016).

Ketiga, peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan, penelitian ini membahas mengenai peran pendamping dalam memperdayakan masyarakat miskin dan strategi apa yang digunakan, selain itu juga menjelaskan mengenai peran pendamping, faktor internal maupun eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PKH, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran pendamping, faktor penghambat dan pendukung dalam pendampingan Program Keluarga Harapan (Evi & Bagus, 2017). Keempat, model kemandirian masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial melalui program PKH Kota Surabaya, penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat yang masih belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarganya dan peran pemerintah lah yang sangat dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kemudian menyejahterakan masyarakat sampai memiliki kemandirian untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara memberikan kegiatan penyadaran pemikiran masyarakat sampai dengan masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut secara efisien, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sosial di Kota Surabaya melalui program keluarga harapan untuk menjadikan masyarakat penerima manfaat PKH bisa hidup sejahtera (Johan, 2020).

Kelima, peran pendamping program keluarga harapan dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga di Kota Bandar Lampung, peran

pendamping PKH dalam kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kota Lampung 51,11% sangat membantu selain itu dalam program tersebut pendamping selalu melaksanakan pertemuan rutin dan memberikan motivasi-motivasi untuk masyarakat, sedangkan dalam kesejahteraan masyarakat 71,11% pendamping memiliki peran untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera, dengan peran pendamping ini masyarakat setiap pertemuannya selalu mengalami perkembangan dari segi kemandirian dan kesejahteraannya (Devi, 2019).

Dari semua penelitian terdahulu, penelitian yang pertama dan kedua sama-sama membahas mengenai pendamping dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dari segi psikologisnya maupun ekonominya dengan cara melakukan sosialisasi ataupun pelatihan yang sudah disediakan. Selain itu penelitian terdahulu juga sama-sama menggunakan teori strukturasi yang dimiliki oleh Anthony Giddens. Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga sampai dengan kelima sama-sama membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program PKH, kemudian dalam penelitiannya juga membahas tentang peran pendamping PKH secara rinci dan pengaruh pendamping PKH dalam mensukseskan pemberdayaan yang dijalankan. Tetapi yang menjadi fokus topik penelitian yang akan dilakukan adalah peran PKH (Program Keluarga Harapan) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani dari keluarga penerima manfaat yang mana peran dari program PKH sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat penerima manfaat agar bisa keluar dari kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang menerima manfaat dari program PKH ini masih banyak masyarakat yang belum sejahtera secara perekonomiannya dan masih terdapat salah satu anak dari pihak keluarga penerima manfaat yang tidak melanjutkan pendidikannya. Sedangkan salah satu dari kewajiban peserta PKH ialah harus menyekolahkan anaknya minimal 12 tahun namun masih ada masyarakat yang tidak melakukan hal tersebut. Selain itu peneliti juga akan menggali mengenai strategi apa yang digunakan oleh program PKH di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, untuk mensejahterakan

masyarakat penerima manfaat dengan menggunakan perspektif teori strukturasi yang dimiliki oleh Anthony Giddens, yang mana struktur dan agensi memiliki dualitas yang sama yang nantinya akan menghasilkan sebuah sosial praktis yang diharapkan.

Dari penerapan program di atas peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai Program Keluarga Harapan yang dibentuk pemerintah untuk membantu keluarga miskin dengan judul “Peran PKH (Program Keluarga Harapan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Buruh Tani Di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Peran PKH mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani melalui pendamping PKH di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani di Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat diperoleh baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat penelitian ini secara terperinci adalah:

- **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi keilmuan tentang Pemberdayaan, Kesejahteraan, Kemiskinan dan upaya atau program dari Pemerintah yang bisa menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada dimasyarakat.

- **Manfaat Praktis**

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- b) Peneliti dapat menambah pengetahuan serta pemahaman yang berhubungan dengan peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan KPM dari keluarga buruh tani maupun KPM lainnya. Selain itu dapat meningkatkan kompetensi dalam bidang pemberdayaan masyarakat.